

# “Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus pada Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika)”

**Evi Priyanti**

University of Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur,  
Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361  
email : [priyantievi@gmail.com](mailto:priyantievi@gmail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) . Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Sumedang yang belum maksimal seperti lambannya layanan elektronik untuk diakses pengusaha yang akan mengikuti pengadaan barang dan jasa, kapasitas server yang masih kecil sehingga seringkali ada kerusakan berkas penawaran milik pengusaha yang juga tidak bisa diakses oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Sumber Daya Manusia yang belum optimal. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan tujuan dapat menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelayanan publik berbasis e-government di Kabupaten Sumedang yaitu pelayanan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sumedang sudah dilakukan dengan berbasis elektronik government yaitu dengan menggunakan teknologi dan informasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan khususnya kepada para pengusaha yang akan mengikuti pengadaan barang dan jasa. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik tersebut dapat dilihat dari kriteria efektivitas, kriteria efisiensi, kriteria keadilan, dan kriteria daya tanggap. Namun dari keempat kriteria tersebut masih ada kekurangan dari kriteria daya tanggap bahwa masih sedikit dari pegawai yang ahli di bidang teknologi dan informasi dalam pengadaan secara elektronik sehingga pemerintah Kabupaten Sumedang harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik.*

*Kata Kunci : Pelayanan publik, E-Government*

## Introduction

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang *good governance* dan *clean governance* khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu diterapkan suatu sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu pelayanan publik. Tanggung jawab pelayanan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat diletakan di tangan pemerintah. Fungsi pelayanan jasa publik, jasa pasar, serta pelayanan sipil dan fungsi pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintah. Dengan demikian, hanya melalui fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari rakyat sedangkan rakyat sendiri akan hidup sejahtera dalam suatu hubungan kerakyatan dan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Seiring dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, kini terjadi perubahan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini berubah secara elektronik dengan menggunakan jasa layanan internet.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud adalah pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan pelayanan atas jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dijelaskan mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Sebelum adanya Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), pengadaan barang dan jasa dilakukan secara manual yakni ada tatap muka antara pengusaha dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Akan tetapi, Sesudah adanya Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), pengadaan barang dan jasa mulai dari pengumuman pengadaan, pendaftaran perusahaan, evaluasi, pengumuman perusahaan pemenang tender, masa sanggah hingga penetapan pemenang memanfaatkan layanan internet. Semua tahapan proses tersebut, secara bertahap harus menerapkan sistem elektronik melalui internet yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan. Selain itu juga pihak yang terlibat dalam organisasi pengadaan barang/jasa melalui pengedia barang dan jasa antara lain Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat pembuat komitmen (PPK), Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

**Tabel 1.1 Perbedaan pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa secara manual dan elektronik:**

No	Tahapan	Manual	Elektronik
1	Pengumuman	Melalui Koran/Surat Kabar	Melalui Koran dan Website

2	Pendaftaran dan Pengambilan dokumen	Datang langsung (tatap muka)	Download via web
3	Penjelasan dokumen dan Perubahan dokumen	Datang langsung (tatap muka)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi online</li> <li>2. Berita acara tertuang dalam rekaman komunikasi online</li> <li>3. Perubahan dokumen di download via web</li> </ol>
4	Dokumen Penawaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Bentuk hardcopy dengan sampul tersegel disampaikan secara langsung ke panitia dan dibuka secara manual	Bentuk dokumen elektronik yang disandikan (encrypt) dikirim (upload) melalui web dan dibuka (decrypt) secara elektronik
5	Evaluasi penawaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama</li> <li>2. Berita acara datang langsung (tatap muka)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama</li> <li>2. Berita acara di download oleh penyedia via web</li> </ol>
6	Evaluasi Kualifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama</li> <li>2. Berita acara datang langsung (tatap muka)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama</li> <li>2. Berita Acara di download oleh penyedia via web</li> </ol>
7	Usulan calon pemenang	Sama	Sama
8	Penetapan Pemenang	Sama	Sama
9	Pengumuman pemenang	Datang lihat langsung	Diumumkan di web dan dikirimkan melalui email
10	Sanggah hasil lelang	Datang langsung atau surat menyurat	Komunikasi online
11	Penunjukan Penyedia barang/jasa	Sama	Sama
12	Penandatanganan kontrak	Sama	Sama

Sumber : Laporan pelaksanaan peresmian dan sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumedang Tahun 2011

Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai tahun 2012 mengadakan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ). Hal tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman persepsi bagi Aparatur pemerintah serta penyedia barang tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui LPSE. Selain itu juga dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah yang bebas KKN, transparan, terbuka, terciptanya persaingan yang sehat dan akuntabel. Oleh karena itu tentu diharapkan akan ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan dari pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.

Akan tetapi pelayanan publik yang dilakukan oleh LPSE tersebut terdapat beberapa kekurangan yakni:

Lambannya layanan elektronik untuk diakses pengusaha akibat kapasitas server yang kecil sehingga tidak bisa menampung berkas-berkas dari pengusaha. Akibatnya proyek Pemerintah Kabupaten tidak juga dimulai karena tidak ada berkas masuk ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), **sehingga** sejumlah kegiatan atau proyek tak juga bisa terlaksana karena tidak ada proses penawaran dari para pengusaha di Kabupaten Sumedang yang akan mengikuti pengadaan barang dan jasa dengan cara mengikuti pelatihan dalam pengadaan barang dan jasa.

Kapasitas server-nya memang kecil, sehingga seringkali ada kerusakan berkas penawaran milik pengusaha yang juga tidak bisa diakses petugas Unit Layanan Pengadaan (ULP). Oleh karena itu sistem jaringan internet nya harus diperbaiki lagi supaya pelayanan kepada para pengusaha yang akan mengadakan lelang bisa terlaksana dengan baik.

Sumber Daya Manusia (SDM) nya belum optimal, sehingga para petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) harus benar-benar menguasai teknis dan aturan main sistem tersebut. Para pengusaha penyedia barang dan jasa sebagai penyedia juga harus mempelajari mekanisme LPSE itu, serta menguasai dunia teknologi dan informasi.

(Dikutip dari *www.lkpp.go.id*, 31 Agustus 2012)

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal diatas, hal-hal yang berkaitan dengan masih adanya kekurangan dalam kualitas pelayanan yang diberikan LPSE dalam pelayanan publik di Kabupaten Sumedang, hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut sehingga kualitas pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa bisa tercapai dengan baik. Berdasarkan latar belakang penelitian seperti yang diuraikan diatas , maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul penelitian: “Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Kabupaten Sumedang ( Studi Kasus pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika )”.

## **Problem Statement**

Based on elaboration of background above, statements of problem in this study are:

1. Bagaimanakah pelayanan publik berbasis *e-government* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria efisiensi?

2. Bagaimanakah pelayanan publik berbasis *e-government* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria efektivitas?
3. Bagaimanakah pelayanan publik berbasis *e-government* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria keadilan?
4. Bagaimanakah pelayanan publik berbasis *e-government* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria daya tanggap?

### **Conceptual Framework**

Conceptual framework is intended as reference to develop theories and concepts to resolve problems as stated above. By referring to the theory and concept, basic conceptual framework and normative basis were then used in this study. Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Kabupaten Sumedang ( Studi Kasus pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ) menggunakan konsep kriteria kualitas pelayanan dari Kumorotomo (1996) seperti yang dikutip oleh Nurmandi menggunakan kriteria kualitas pelayanan sebagai berikut:

#### Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, criteria seperti likuiditas, solvabilitas dan rentavilitas merupakan criteria efisiensi yang sangat relevan.

#### Efektivitas

Apakah tujuan didirikan pelayanan publik itu tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan, serta fungsi sebagai agen pembangunan.

#### Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan masyarakat merupakan isu pokok dari kriteria ini.

#### Daya Tanggap

Daya tanggap yang dimaksud adalah daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. (dalam Nurmandi, 2010:54-55)

Dengan demikian, untuk mempermudah dan memahami kerangka penelitian, maka penulis menyediakan ringkasannya dalam bentuk model kerangka berpikir yang disajikan sebagai berikut:

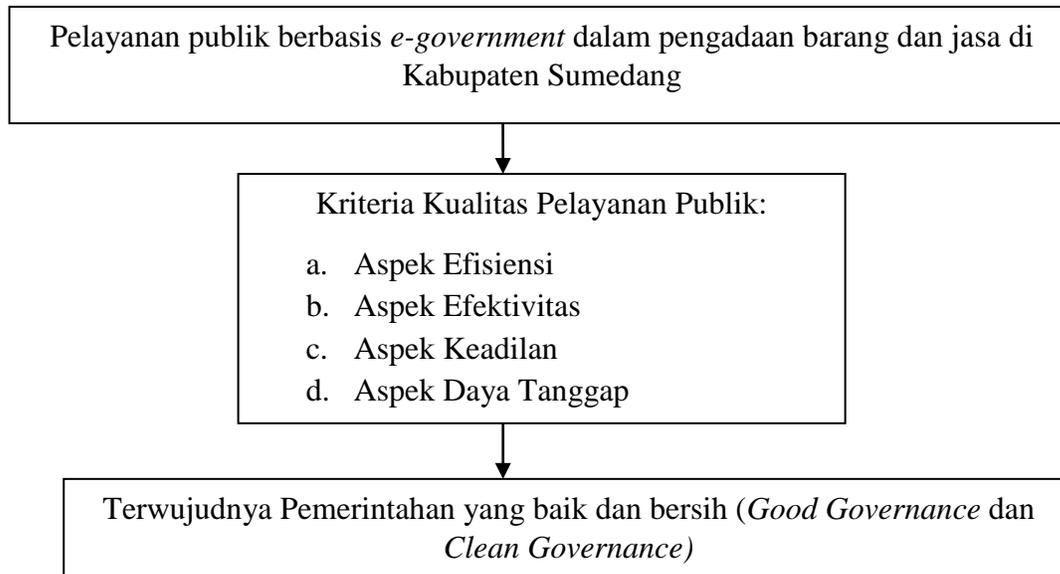


Diagram 1.1 Model Kerangka Berpikir  
(Sumber : Kumorotomo dalam Nurmandi, 2011:55)

## A. Hipotesis Kerja

Pelayanan publik berbasis *e-government* adalah aktivitas pemberian layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan penggunaan teknologi dan informasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, yang pada akhirnya tuntutan pelayanan publik adalah kualitas pelayanan itu sendiri diupayakan harus memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, keadilan, daya tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan menjamin terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Governance*)

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan tujuan dapat menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelayanan publik berbasis *e-government* di Kabupaten Sumedang yaitu pelayanan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability* dimana setiap unsur atau anggota populasi tidak diberi peluang/kesempatan yang sama untuk dipilih. Teknik *non probability* ini ada dua macam yaitu teknik *purposive* dan teknik *snowball*. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah teknik *purposive*.

Untuk mempermudah memahami informan dan informasi yang diharapkan, terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Informan dan Informasi yang diharapkan

No	INFORMAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN
1	Kepala bidang informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang yang merangkap sebagai Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumedang	Memperoleh data bagaimana pelayanan publik berbasis e-government di LPSE Kabupaten Sumedang dari segi kualitas pelayanan yang terdiri dari aspek efisiensi, efektivitas, daya tanggap, dan keadilan.
2	Kepala bagian administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang yang merangkap sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumedang	Memperoleh data bagaimana pelayanan publik berbasis e-government di LPSE Kabupaten Sumedang dari segi kualitas pelayanan yang terdiri dari aspek efisiensi, efektivitas, daya tanggap, dan keadilan
3	Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Kabupaten Sumedang	Memperoleh data bagaimana pandangan mengenai pelaksanaan operasional dalam proses pengadaan barang dan jasa di LPSE Kabupaten Sumedang dari segi kualitas pelayanan yang terdiri dari aspek efisiensi, efektivitas, daya tanggap, dan keadilan.  Memperoleh data bagaimana pandangan dari sisi pengguna layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten Sumedang selaku peserta lelang dan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilelang oleh panitia pengadaan
4	Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Sumedang (DPK)	Memperoleh data bagaimana pandangan mengenai pelaksanaan operasional dalam proses pengadaan barang dan jasa di LPSE Kabupaten Sumedang dari

	Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Kabupaten Sumedang	segi kualitas pelayanan yang terdiri dari aspek efisiensi, efektivitas, daya tanggap, dan keadilan.  Memperoleh data bagaimana pandangan dari sisi pengguna layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten Sumedang selaku peserta lelang dan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilelang oleh panitia pengadaan
5	Pengusaha yang mengikuti pelatihan aplikasi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sumedang	Memperoleh data bagaimana pandangan pengusaha secara individu tidak secara asosiasi selaku peserta dalam layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Sumedang mengenai segi kualitas pelayanan yang terdiri dari aspek efisiensi, efektivitas, daya tanggap, dan keadilan.  Memperoleh data bagaimana pandangan dari sisi pengguna layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten Sumedang selaku peserta lelang dan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilelang oleh panitia pengadaan

Sumber : Olahan Penulis , 2012

## B. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

Pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria efisiensi sudah ada perbaikan mengenai bandwidth nya yang lebih besar sehingga bisa menampung berkas-berkas dari pengusaha, kecuali kalau ada berkas yang rusak dan tidak bisa dibuka oleh pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP), maka pihak ULP bisa meminta bantuan ke LPSE kemudian ke LKPP. Bandwidth yang kecil atau dokumen yang rusak yang tidak bisa diakses oleh pegawai ULP, akan mengakibatkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik terhambat sehingga menyebabkan waktu tidak efisien. Apabila dibandingkan pengadaan barang dan jasa secara manual dan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pengadaan barang dan jasa secara elektronik lebih efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga.

Hal tersebut dapat dilihat dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik lebih efisien karena tidak ada tatap muka antara panitia dan rekanan tapi terbatas pada pembuktian kualifikasi calon pemenang. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa secara manual bahwa ada serangkaian tatap muka antara panitia dan rekanan mulai dari pendaftaran, penerimaan, dan pembukaan dokumen penawaran, serta pembuktian kualifikasi. Hampir seluruh dokumen dalam bentuk softcopy sehingga bisa menghemat dalam penggunaan kertas hal ini berarti bisa memperkecil biaya proses pengadaan. Berbeda dengan pengadaan

barang dan jasa secara manual seluruh dokumen berbentuk hardcopy, sehingga dibutuhkan biaya dalam proses pengadaan.

Dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik, panitia pengadaan barang dan jasa dapat bekerja dimana saja tidak dibatasi ruangan dan waktu sepanjang mendapatkan akses komunikasi melalui internet sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan melalui proses pengadaan dengan upaya yang cukup mudah dan biaya rendah, karena melalui komunikasi dunia maya. Berbeda dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara manual bahwa panitia bekerja secara stasioner selama proses pengadaan sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan melalui proses pengadaan dengan upaya yang cukup berat dan biaya tinggi karena harus hadir secara fisik.

Pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria efektivitas yaitu sasaran dan tujuan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bebas KKN, transparan, terbuka, terciptanya persaingan yang sehat dan akuntabel masih ada kekurangan dari segi transparansi karena pengumuman pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang hanya diumumkan kepada pihak pemenang tender saja. Hal demikian dapat menjadi masukan kepada pihak Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bahwa sebaiknya untuk kedepannya dalam pengumuman pemenang seharusnya diumumkan kepada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Selain itu juga harus diumumkan tidak hanya melalui email saja akan tetapi juga harus melalui telepon dan surat.

Pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria keadilan menunjukkan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik apabila dilihat dari kriteria keadilan sudah terlaksana dengan baik karena pengusaha bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa jika memenuhi persyaratan seperti yang sudah disebutkan diatas. Selain itu juga di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) itu sendiri disediakan ruangan pelatihan untuk para pengusaha yang belum memahami tata cara pengadaan secara elektronik. Para pengusaha juga bisa konsultasi kepada petugas di LPSE setiap hari kerja apabila ada yang belum dipahami. Semua pengusaha boleh mengikuti pengadaan barang dan jasa secara elektronik jika memiliki sertifikat badan usaha (SBU).

Pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria daya tanggap masih ada kelemahan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dari pihak LPSE maupun ULP yang masih ada kekurangan yang ahli dan bidang teknologi dan informasi.

## **Saran**

Dengan berupaya memperhatikan persoalan-persoalan yang ditemukan selama penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

Melihat hasil penelitian bahwa dalam sistem pengadaan barang secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) inovasi layanan pengadaan dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK) diharapkan dapat mengatasi permasalahan di atas seperti halnya teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) membantu mempercepat dan mengefisienkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yaitu dalam hal harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, layanan publik yang lebih baik, dan siklus pengadaan yang lebih pendek.

Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) bagi pemerintah diharapkan meningkatkan transparansi, yaitu transparan dalam memberikan pengumuman pengadaan barang dan jasa secara elektronik tidak hanya diumumkan kepada pihak pemenang tender saja. Hal demikian dapat menjadi masukan kepada pihak Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bahwa sebaiknya untuk kedepannya dalam pengumuman pemenang seharusnya diumumkan kepada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Selain itu juga harus diumumkan tidak hanya melalui email saja akan tetapi juga harus melalui telepon dan surat.

Pada sebagian besar penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan langkanya sumber daya yang handal, budaya penggunaan teknologi infrastruktur yang memadai dalam hal akses internet, hendaknya menjadikan mereka yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah meningkatkan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Kesadaran akan melekat teknologi menjadi unsur utama dalam penerapan sistem e-procurement.

Pemerintah Kabupaten Sumedang sebaiknya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di bidang teknologi dan informasi supaya pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

## Referensi

- Affandi, Mochtar. 1977. Ilmu-Ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan . Bandung: Lembaga Penerbitan FISIP UNPAD
- Andrianto, Nico. 2007. Good e-Government : *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta: ANDI.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Government in Action*. Yogyakarta: ANDI
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik*. Bandung: CV Mandar Maju
- Kaho, Joset Riwo. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada
- Kurniawan, dkk. 2007. *Wajah Buram Pelayanan Publik*. Jakarta: Yappika
- Koswara, E. 1999. *Otonomi Daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat*. Jakarta: Widya Praja HP.
- Manila, IGK. 1996. *Praktik Manajemen Dalam Negeri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Martiani, Husein. 1955. *Kerangka Pemikiran, Konsep Pengukuran Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Pelayanan Publik & Customer Satisfation*. Bandung: PT. Alumni
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurmandi, Achmad. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PT Sinergi Visi Utama

- Rasyid,Ryass. 1997. Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etiks dan Kepemimpinan. Jakarta: PT Yursif Wastampoe.
- Saefullah, A.Djaja. 1999. “Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik.” Dalam Jurnal Publik, Volume 1 Nomor , Bandung: UNPAD.
- Sedarmayanti. 1999. Restruturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan. Bandung : Mandar Maju
- Salam,Setyawan Dharma. 2002. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djembatan
- Sinambela, Lijan Poltak.2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*.Bandung: PT Refika Aditama.
- Tim Redaksi Forum Sahabat. 2011. *Buku PINTAR Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Disusun berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 & Peraturan terkait lainnya*. Jakarta: Forum Sahabat

### **Peraturan perundang-undangan:**

- Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- Peraturan Bupati No 62 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sumedang
- Peraturan Bupati No 73 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumedang

### **Pustaka Internet :**

- Koswara, Engkos.”Tentang lambannya layanan elektronik untuk diakses pengusaha akibat kapasitas server yang kecil sehingga tidak bisa menampung berkas-berkas dari pengusaha”. Available online at <http://www.inilahjabar.com/read/detail/1899615/lelang-sepi-karena-lpse-sumedang-sulit-diakses>
- Hermnasah, Dede. ”Tentang lelang proyek Kabupaten Sumedang melalui Internet”. Available online at <http://www.pikiran-rakyat.com/node/170730>
- Murdono, Don. ”Tentang lelang proyek Kabupaten Sumedang melalui Internet”. Available online at <http://www.pikiran-rakyat.com/node/170730>

### **BIODATA**

Nama : Evi Priyanti, S.IP, M.Si

Pendidikan : 1.Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (S-1 UNPAD)

2.Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (S-2 MAPD-IPDN)

Dosen : Dosen Tetap di Universitas Singaperbangsa Karawang

Alamat: Jl Jatihurip RT 01 RW 06 Sumedang, Jawa Barat 45352  
(Telepon : 085721713217, email: [priyantievi@gmail.com](mailto:priyantievi@gmail.com))